

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Dahl Robert, 2008, *Electoral Complaints Adjudication and Dispute Resolution: Key Issues and Guiding Principles 3*, IFES.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2006, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005*, Pustaka Pelajar.
- Anonim, 2012, *Demokrasi Lokal : Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Anonim, 2011, *Buku Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Anonim, 2010, CETRO, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, Indonesia Printer, Jakarta, Indonesia. Buku asli dicetak di Trydells Tryckeri AB, Swedia.
- Anonim, 2010, *Profile of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MK RI.
- Anonim, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Anonim, 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta, KPU Povinsi DIY.
- Anonim, 2004, "Menjaga denyut Nadi Konstitusi: Refleksi satu Tahun Mahkamah Konstitusi", Jakarta, Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Peradilan Konstitusi Di 10 Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Butt, Simon dan Tim Lindsey, 2009, *The People's Prosperity? Indonesian Constitutional Interpretation, Economic Reform, and Globalization*, In John Gillespie & Randall Peerenboom (eds.), *Regulation in Asia-Pushing Back on Globalization*, London and New York: Routledge.
- Byamugisha, Constance K., 2003, *Administering Justice Without Undue Regard to the Technicalities*, Greenwatch.
- Dicey. A.V., 1959, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Tenth Edition, London, Macmillan Education LTD.
- Mike Mc Conville dan Wing Hong Chui (ed), 2007, *Research Method of Law*, Edinburg University Press.
- Fatkurohman, dkk., 2004, *Memahami Keberasaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gloppen, Siri et al, 2004, *Democratization and Judiciary: The Accountability of Courts in New Democracies*, Portland, Frank Cass Publishers.
- Huda, Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Lev, Daniel S., -1990, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, Cet : I.LP3S.
- Mahendra. A.A.Oka, 2005, *Pilkada di Tengah Konflik Horisontal*, Milleniüm, Jakarta, Publisher.
- Mahfud MD, Mohammad, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.
- Mahfud MD, Mohammad, 2007 *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, LP3ES.
- Najib, Mohammad, 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta, KPU DIY.
- Norbert Eschborn (ed), 2005, *Tugas dan Tantangan: Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, Jakarta, Konrad-Adenauer-Shiftung e.V.

- Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin (Ed), 2009 *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- Santoso, Topo dkk, *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*.
- Soemantri, Sri, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Surdiasis, Fransikus, Ulin Ni'am Yusron, Rusdi Mathori, 2008, *10 Tahun Reformasi Untuk Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sutiyoso. Bambang, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, UII Press.
- Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Vanberg. George, 2005, *The Politics of Constitutional Review in Germany*, United State of America, Cambridge University Press.
- Yamin. Muhammad, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta, Yayasan Prapanca.
- Young. John Hardin, 2009, *International Election Principles: Democracy and the Rule of Law*.

B. JURNAL

- Arifin Husein, Zainal, *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 Nomor 6, Desember 2010, Mahkamah Konstitusi RI.
- Cole, Taylor, *The West German Federal Constitutional Court: An Evaluation after Six Years*, *the Journal of Politics*, Vol. 20, No. 2 May, 1958.
- Dwi Prastanta, Lutu, *Mahkamah Konstitusi dan Prinsip Judicial Independence dalam Sengketa Antar Lembaga Negara*, *Jurnal Konstitusi Volume IV Nomor 2*, November 2011.

- Ekatjahjana, Widodo, Beberapa Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MK RI dan Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol III, No. 1, Juni 2010.*
- Ekatjahjana, Widodo, Telaah Kritik atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No.1, Februari 2011.*
- Fadjar, A..Mukthie, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU, *Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009.*
- Fahmi, Khairul, Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, *Jurnal Konstitusi volume 7 nomor 3, Juni 2010.*
- Hastuti Puspitasari, Sri, Menegakan Demokrasi dan Konstitusionalitas Pemilihan Umum Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 3, Juni 2011, Mahkamah Konstitusi RI.*
- Junaedi, Veri, Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu, *Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009.*
- Junaedi, Veri, Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, *Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010.*
- Noorwahidah, Sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat (Analisis Terhadap Putusan MK No. 45/PHPU.D-VII/2010 dari Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam), *Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No.1, Februari 2011.*
- Nur Wijayanti, Septi, Pergeseran Kewenangan Penyeleasain Sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, *jurnal konstitusi, volume III Nomor I, Juni 2010, PK2P-FH UMY.*
- Prasetianingsih, Rahayu, Penafsiran Konstitusi oleh Mahkakah Konstitusi Menuju Keadilan Substantif, *dalam Jurnal Konstitusi PKK Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.*

Siahaan, Maruarar, Implementasi Putusan No.27/PHPU.D-VII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, *Jurnal Konstitusi, Jakarta, 2011.*

Sutiyoso, Bambang, Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Kewenangan, *Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.*

Syahuri, Taufiqurrohman, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu, Vol. II, No. 1, Juni 2009.*

C. KARYA ILMIAH

Kasim, Helmi, Syukri Asy'ari, Meyrinda R. Hilipito dan Rio Tri Juli Putranto) dengan judul "Kompatibilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan-Putusan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", Penelitian yang didanai oleh Mahkamah Konstitusi.

Satriawan, Iwan, 2003, Impeachment in Indonesia and The United State: A comparative Study, Thesis Master di International Islamic University Malaysia

Wijayanti, Septi Nur, 2010, Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis), Penelitian yang didanai oleh Mahkamah Konstitusi.

D. MAKALAH

Amanwinita, Rukmana, Eksistensi Mahkamah Konstitusi Indonesia, Makalah disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 29 Mei 2003.

A. Mukthie Fajar, Beberapa Masalah dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Dekan FH, Tim Pengelola Video Conference, dan Ketua Pusat Kajian Konstitusi se-Indonesia tanggal 20-22 Maret 2009 di Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, Mahkamah Konstitusi Dan Cita Negara Hukum Indonesia, MaPPI-FHUI.

Bertrand Fort (Ed), Democratising Access to Justice in Transitional Countries, Proceeding of Workshop "Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries. Indonesia. 27-28 Juni 2005.

Hazama, Yasushi, 2009, Constitutional Review and Democratic Consolidation: A Literature Review, Paper presented at IDE Discussion Paper, Japan.

Kriegler Commission Report, Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections, supra note 3, at 139, USAID,

K. Byamugisha, Constance, Justice of the Court of Appeal of Uganda. Administering Justice Without Undue Regard to the Technicalities, Greenwatch.

Nasution, Adnan Buyung, Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Mahkamah Konstitusi, Makalah Forum Diskusi Hukum Bandung, 2002.

Santoso, Topo, dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta : 27 Maret 2009, dikutip dalam KMPP.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

F. WEBSITE

AA GN Ari Dwipayana:

http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadal_dan_otoda.htm

Abdul Kholek: Peranan Elit Lokal Dalam Mewujudkan Demokratisasi Di Daerah Pasca Reformasi _ Abdul Kholek, Sosiologi '04 _ Komunitas Blogger Unsri.htm, diakses tanggal 6 Oktober 2010

Act, 1993. *German Confederation*, lihat

http://en.wikipedia.org/wiki/German_Confederation

Daniel B. Ratu, *Pemilukada Lembata Pasca Putusan PTUN Kupang*, danyratu.blogspot.com/2011/04/mk-berkan-legal-standing-bagi-bakal.html.

Ellyasa KH, A Weekly Personal Journal 2007 , *Pilkada Sumber Konflik*.htm

Federal Constitutional Court Act (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG) lihat di

<http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm> pada tanggal 30 september 2012 pukul 21.30 WIB.

- <http://bertoamigo.wordpress.com/perdamaian/nanti-diisi-pak-robert-2/di-balik-pemilu-spanyol/>
- http://www.Idea.int/publications/emd/upload/EMD_CS_Costa_Rica.
- <http://www.info.gov.za/gazette/acts/1996/a51-96.htm>
- <http://www.gats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-amerika-serikat.html>
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=5318> diunduh pada hari jumat 7 september 2012 pukul 13.45 WIB
- <http://www.nigerialaw.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm#ElectionTribunals>
- <http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/index.html>
- <http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/organization1.html>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_court
- IFES, Juni 2010. Lihat: <http://www.v-brazil.com/government/laws/titleIVJustice.html>.
- I Gusti Putu Artha, *Perselisihan Hasil Pemilukada: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemilukada*.
www.kpu-kabupatenpacitan.go.id
- Independent High Electoral Commission of Iraq, dapat dilihat di http://www.ihec.iq/download/cpa_92_ieci_en.pdf. pada tanggal 25 september 2012 pukul 19.50
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1996, pasal 25, dapat dilihat di <http://www.ohcr.org/english/law/ccpr.htm>. hari jumat tanggal 7 september 2012 pukul 14.00 WIB
- kompas cybermedia.com 26 juli 2006
- Maqdir Ismail, "Menyongsong Masa Depan Bangsa", Pidato Sambutan Alumni, yang dibacakan di hadapan wisudawan/wisudawati UII Periode VI Tahun Akademik 2009/2010 di Yogyakarta, 24 Juli

- Mengkritisi revisi UU Pemda dari Ilmu Peraturan Perundang-undangan",
<http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 5 Mei 2008
- MK Merampas Kewenangan KPU dan PTUN,
<http://www.mediaindonesia.com/2010/08/06/160511/16/1/>
- Perbandingan Mahkamah Konstitusi, 2010,
<http://cwiexz.blogspot.com/2010/02/perbandingan-mahkamah-konstitusi.html>
- Preliminary Report, Carter Center Finds Ghana's Presidential Run-Off Elections Credible and Peaceful, The Carter Center (30 Des, 2008), http://www.cartercenter.org/news/pr/ghanã_prelim_123008.
- republika.co.id, Kamis, 8 juli 2010.
- Robert A. Dahl, IFES, Electoral Complaints Adjudication and Dispute Resolution: Key Issues and Guiding Principles 3 (2008) dapat dilihat di http://210.69.23.129/download/d_6/IFES.doc
- SADC Parliamentary Forum, Norms and Standards for Elections in the SADC Region 15 (2001) iihat di http://aceproject.org/eroen/regions/africa/regional-resourcesafrica/sadcpf_electionnormsstandards.pdf/view. pada tanggal 25 september 2012 pukul 19.49 WIB
- Saksi Ahli Dukung Putusan MK Kasus Kobar,
<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=68858>, Selasa, 27 Juli 2010.
- Saldi Isra, Sewindu Mahkamah Konstitusi, <http://www.saldiisra.web.id> diunduh pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 pukul 15.00 WIB
- Sara Staino, Uruguay: The Electoral Court – A Fourth Branch of Government 1-2, dapat dilihat di http://aceproject.org/eroen/regions/america/UY/Uruguay_TheElectoralCourtpercent20AFourthBranchofGovernment.pdf/view?searchterm=uruguayelectoralpercent-20court

Supreme Court Of Philipines di <http://suite101.com/article/powers-and-functions-of-the-philippine-supreme-court-a228428>

Tabulasi perkara sengketa pemilukada di website:
mahkamahkonstitusi.go.id

Universal Declaration of Human Rights, 1984, pasal 21, diunduh di
<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml> pada hari
jumat tanggal 7 september 2012 pukul 14.00 WIB

Venice Commission Code, supra note 44, at 26. Lihat di
www.academicsforabolition.net/repositorio/ficheros/361_135
pada tanggal 25 september 2012 pukul 19.45 WIB

What is an electoral management bodies lihat di
<http://aceproject.org/ace-en/topics/em/ema/ema01>

www.forumkeadilan.com/debat.php?tid=63, diunduh pada tanggal 4
September 2012 jam 16.02.

www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 24 November 2012

www.medanbisnisonline.com

[www. Partai info.com](http://www.Partai.info.com), diakses pada tanggal 20 Januari 2009

www.Sarwono.net. Meraih dan melepaskan kekuasaan, diakses pada
tanggal 20 Januari 2009

[www.yipd.or.,id/berita](http://www.yipd.or.id/berita), diunduh pada tanggal 4 September 2012 jam
16.05.

G. KAMUS

Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, Thomas
Reuters, West Publishing Co.

H. SURAT KABAR

MK Buat Tafsir Sepihak Dugaan Pidana Pemilu Kada, *Media Indonesia*, Senin, 19 Juli 2010.

Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada (Sepanjang Maret 2011), *Majalah Konstitusi* No. 50 – Maret 2011.

Laporan Utama "Lonjakan Perselisihan Hasil Pemilukada", *Majalah Konstitusi* No. 40 – Mei 2010

Simulasi Pemilu Serentak Model Nasional-Lokal, *Harian Republika*, Kamis 4 Oktober 2012

I. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VII/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011